



RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

KEBUMEN, 20 JUNI 2022



ARAHAN PRESIDEN

Joko Widodo

TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat

Rabu, 17 November 2021 | 19:12 WIB
Oleh: Lenny Tristia Tambun / FFS

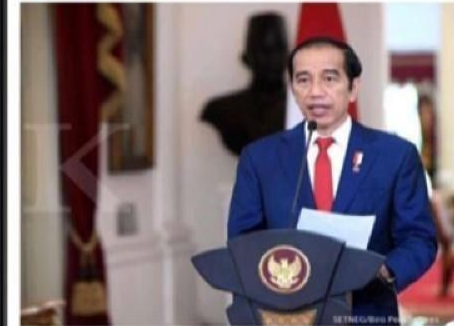


Joko Widodo. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Jokowi minta pengadaan barang/ perhatikan TKDN dan UMKM

Oleh: Abdul Basith Bardan

Rabu, 18 November 2020 15:12 WIB



- 1 Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 2 Tingkatkan Porsi UMK dan Koperasi
- 3 Percepat Penyerapan APBN/APBD

Perubahan Kebijakan Belanja Pemerintah RI



1

Pro UMK Koperasi

- 40% Belanja untuk UMK-Koperasi
- UMK-Koperasi Tak Diutang karena Ada Kartu Kredit Pemerintah

2

Pro Pemerataan Ekonomi

- Pengusaha Lokal Mudah Masuk e-Katalog Lokal Pemda
- e-Katalog Lokal Pemda Dorong Pemerataan Ekonomi ke Seluruh RI

3

Terintegrasi dan Terdigitalisasi

- Terdigitalisasi sejak Perencanaan hingga Pelaksanaan Proyek
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Antar Kementerian
- Mengintegrasikan Belasan Marketplace Swasta ke Sistem Belanja Negara

4

Mudah Diakses Dunia Usaha

- Pemangkasan Birokrasi: Mudahkan Produk Masuk Katalog Elektronik
- Target 1 Juta Produk Tayang pada 2022

PERATURAN TERKAIT PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN)



Keppres
80/2003
tentang
**Pedoman
Pelaksanaan
PBJ
Pemerintah**

2

Permenperin 49/M-
IND/PER/5/2009 jo
49/M-IND/PER/5/2009
tentang Pedoman
Penggunaan PDN

4

PP 29/2018 ttg
Pemberdayaan
Industri

6

1

UU 3/2014
Pengganti UU
No. 5/1984

UU 5/1984
tentang
Perindustrian

3

Inpres 2/2009
tentang
**Penggunaan PDN
Dalam PBJ**

5

Perpres No.
16/2018 diubah
dengan No
12/2021 tentang
PBJ Pemerintah

7

**Inpres 2/2022 ttg
Percepatan P3DN,
Produk Usaha Mikro dan
Koperasi dlm rangka
menyukkseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia pd
Pelaksanaan PBJ**

MEDIA MONEV WAS P3DN



Reviu/Evaluasi

APIP K/L

QA Entry



Retrieve - Data

PPK K/L

Entry Data

MISKIN DATA DIGITAL
KOLABORASI PEMANFAATAN DATA RENDAH



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : PE.11.02/S - 400/K/SU/2022

Jakarta, 25 Mei 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Monitoring Data P3DN dan
Pengisian Aplikasi Siswas P3DN

Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(Daftar Terlampir)
di tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2022 mengenai Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota untuk memantau pengisian data Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di instansi masing-masing ke dalam aplikasi Siswas P3DN. Data tersebut menjadi bagian hasil pengawasan yang akan kami laporkan kepada Bapak Presiden pada akhir Juni 2022.

Aplikasi Siswas P3DN dapat diakses melalui tautan <https://apip.bnpk.go.id/p3dn/public>. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan monitoring data P3DN dan pengisian aplikasi dapat ditanyakan lebih lanjut melalui https://t.me/Helpdesk_P3DN.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

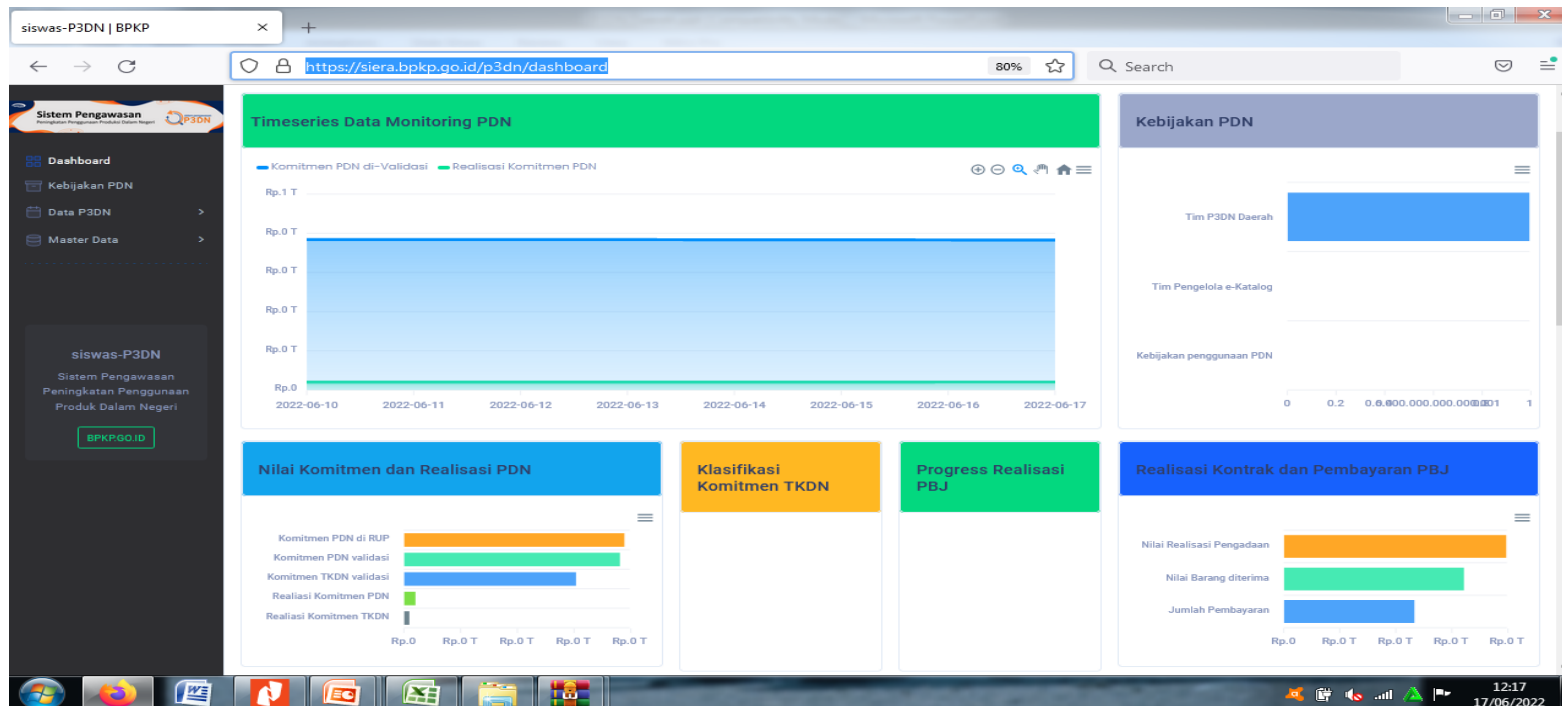
Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

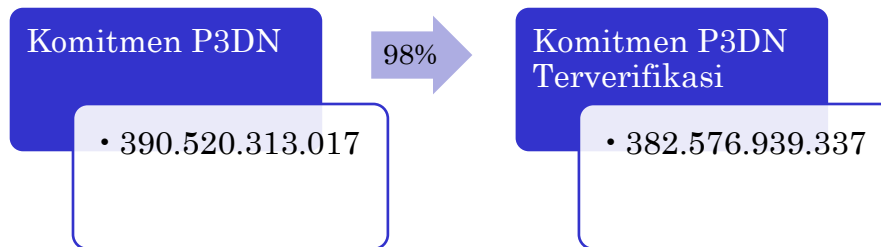
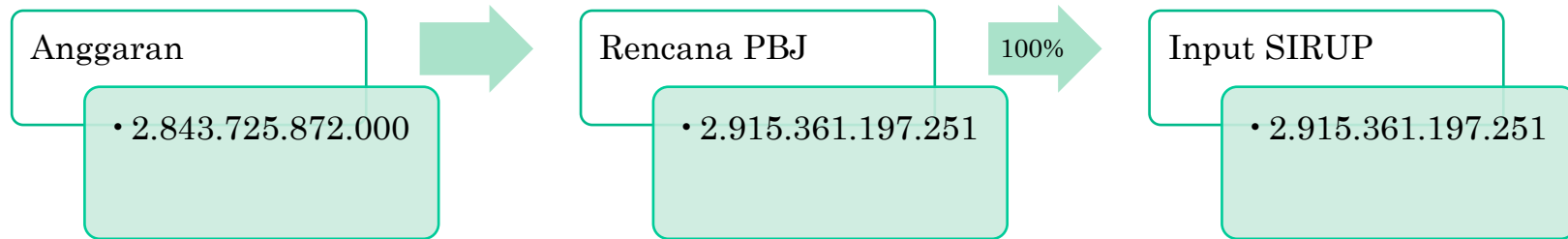
Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

APLIKASI

- Aplikasi yang digunakan dalam penginputan monitoring pelaksanaan P3DN pada aplikasi <https://siera.bpkp.go.id/p3dn/>



ANGGARAN BELANJA, KOMITMEN PDN, DAN PENGISIAN SISWAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PER TANGGAL 19 JUNI 2022



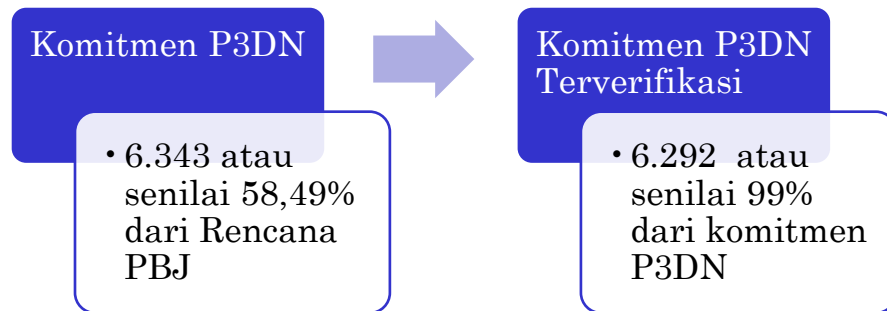
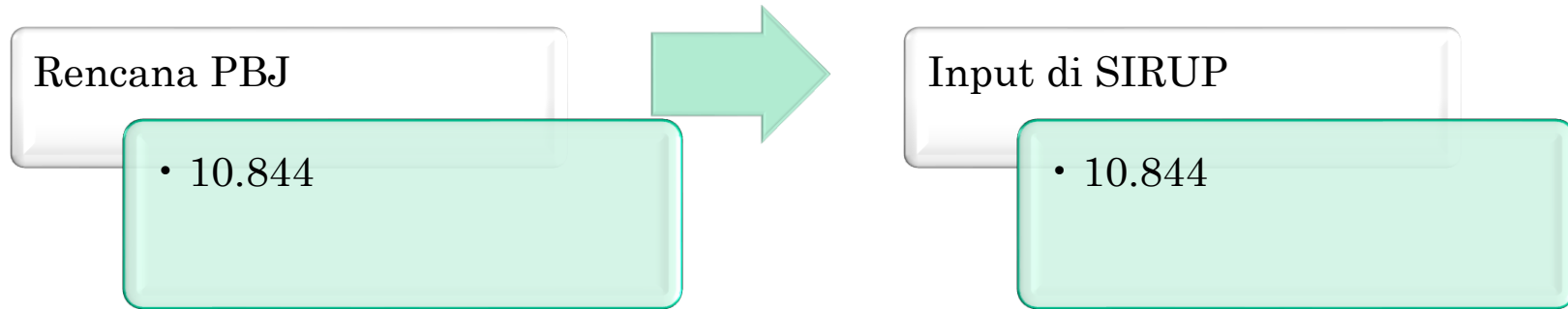
	Total Nilai
Nilai PDN RUP	390.520.313.017
Nilai PDN Validasi	382.576.939.337
Nilai PBJ Realisasi	24.134.532.702
Nilai TKDN Realisasi	9.623.732.266

Catatatan:

- Belanja Gaji, Honor Di Input Dalam Rup.
- Perencanaan PBJ Lebih Besar dari APBD



PAKET BELANJA, KOMITMEN PDN DAN PENGISIAN SISWAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Uraian	Total Paket
Komitmen PDN	6.343
Verifikasi PPK	6.292
Realisasi Belanja PBJ	1.094
Relaisasi Belanja PDN	1.081



MONITORING PADA APLIKASI SISTIM PENGAWASAN P3DN
PADA WILAYAH KERJA PERWAKILAN BKPD DIY , S/D 17 JUNI 2022 JAM 16,30



No	Nama Pemda	Nilai PBJ RUP	Nilai PDN RUP (Rp)	% PDN dari PBJ RUP	Paket PDN RUP	Paket PDN Validasi	Paket PDN Realisasi	Nilai PDN Realisasi	SK Tim P3DN	Pengelola e-Katalog
1	KAB. CILACAP	1,563,584,679,705	802,663,015,156	51%	6.380	4.753	621	130.902.729.724	1	1
2	KAB. KEBUMEN	2,915,361,197,251	390,520,313,017	13%	6.343	6.292	1.018	20.350.729.482	1	0
3	KAB. PURWOREJO	938,501,532,092	527,036,013,702	56%	1.250	834	141	37.206.770.510	1	0
4	KAB. MAGELANG	1,727,244,135,075	475,405,804,331	28%	7.225	3.354	610	2.903.973.342	1	1
5	KAB. KLATEN	869,440,250,005	563,641,623,317	65%	8.685	4.786	1.064	62.078.718.161	1	0
6	KOTA MAGELANG	589,421,635,841	239,282,625,127	41%	6.412	6.384	1.794	12.083.857.706	1	1
7	PROVINSI DIY	2,557,378,532,682	1,474,993,859,421	58%	17.690	7.208	1.723	182.976.616.458	1	1
8	KA. KULON PROGO	599,657,785,853	253,284,038,027	42%	5.131	3.994	1.179	16.026.030.724	1	0
9	KABUPATEN BANTUL	1,520,991,422,063	302,872,327,548	20%	1.384	888	240	19.529.374.134	1	0
10	KAB. GNG KIDUL	2,064,634,097,856	320,524,204,129	16%	1.054	619	148	6.497.835.498	1	0
11	KAB. SLEMAN	3,218,600,639,517	857,345,149,880	27%	7.117	4.257	911	73.375.474.661	1	1
12	KOTA YOGYAKARTA	1,803,323,843,753	591,593,743,993	33%	8.580	4.733	905	27.684.515.434	1	1

CATATAN:
E KATALOG LOKAL BELUM
DIBUAT.

REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Nilai PDN Realisasi		Nilai PDN Validasi		Prosentase	
Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket
20.529.983.154	1.081	382.576.939.337	6.292	5%	17%

HAMBATAN CAPAIAN :

- ✓ OPD BELUM MELAKUKAN ENTRY DATA REALISASI SECARA KESELURUHAN DISIERA
- ✓ BELUM DILAKSANAKAN PENGADAAN
- ✓ PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DIJADWALKAN PADA TRIWULAN III & IV
- ✓ BELUM SEPENUHNYA MELAKUKAN KOORDINASI, DAN EVALUASI PELAKSANAAN P3DN
- ✓ BELUM MEMETAKAN/MENGINVENTARISASI PRODUK DALAM NEGERI YANG DIPRODUKSI DI DAERAHNYA

KEWAJIBAN KABUPATEN

- Melaksanakan *update* kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN.
- Membuat nilai komitmen pengadaan Produk Dalam Negeri yang direncanakan.
- Melaksanakan monitoring *Progress* realisasi komitmen belanja produk dalam negeri dalam PBJ.



HASIL MONITORING DAN PENGAWASAN
BPKP TERHADAP P3DN DI
KABUPATEN/KOTA YANG DISAMPAIKAN
PADA SAAT RAKORNAS WASIN
TANGGAL 16-6-2022 BY DARING



Pengawasan BPKP dalam Mendorong Aksi Bela Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah



MONITORING

Realisasi P3DN

REVIU

Pengawasan atas Kebijakan dan Kelembagaan P3DN

- Kebijakan Tim P3DN
- Kebijakan Keberpihakan Produk Lokal

Pengawasan atas Implementasi P3DN

- Demand
- Market
- Supply

HASIL MONITORING P3DN MELALUISISWASP3DN (PER 14 JUNI 2022 PUKUL 06.00 WIB)

1. Terdapat 3 pemerintah daerah yang belum menginput RUP
2. Terdapat 356 pemerintah daerah yang nilai RUP melebihi total anggaran PBJ unit kerja. Tingkat overstated nilai RUP sekitar 101,01% s.d. 337,13%
Disebabkan : **Belanja Gaji, Honor dll diinput dalam RUP**



HASIL REVIU – KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN P3DN DAERAH

KEBIJAKAN KEBERPIHAKAN PRODUK LOKAL (174 Pemerintah Daerah)

1. Telah mengatur kewajiban penggunaan hasil produksi lokal/produk unggulan daerah dalam kegiatan rutin OPD.
2. Telah mengatur kewajiban pengalokasian minimal 40% anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola masing masing OPD untuk produk UMKM/Koperasi
3. Telah mengarahkan untuk peningkatan jumlah transaksi belanja dalam Toko Daring/Bela Pengadaan.
4. Beberapa telah mengarahkan untuk mendorong percepatan penayangan produk dan peningkatan jumlah transaksi dalam katalog lokal.
5. Beberapa telah mengakomodasi pemberian insentif pajak dan/atau retribusi daerah kepada UMKM
6. Beberapa telah mengatur tentang fasilitasi pengembangan usaha dan kerja sama kemitraan UMKM.
7. Belum mengakomodasi fasilitasi sertifikasi TKDN untuk pelaku usaha.

HASIL REVIU – KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN P3DN DAERAH

TIM P3DN (383 Pemerintah Daerah)

1. Terdapat Pemda yang belum melibatkan Unsur Dunia Usaha dalam Tim P3DN
2. Terdapat Pemda yang tidak melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Dinas UMKM sebagai Tim P3DN
3. Tim P3DN belum sepenuhnya melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan P3DN
4. Tim P3DN belum sepenuhnya memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN.
5. Tim P3DN belum memetakan/menginventarisasi produk dalam negeri yang diproduksi di daerahnya.



HASIL REVIU – ASPEK DEMAND

1. Terdapat 216 pemerintah daerah yang belum merencanakan minimal 40% untuk belanja produk dalam negeri.
2. Terdapat 285 pemerintah daerah yang belum merencanakan minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMK dan Koperasi.
3. Terdapat barang wajib ($TKDN + BMP \geq 40\%$) antara lain berupa Personal Komputer, Laptop, dan Mesin Excavator yang tidak dibeli oleh pemerintah daerah

HASIL REVIU – KATALOG LOKAL

- Minim fasilitasi layanan e-katalog lokal baik melalui helpdesk maupun mall layanan publik.
- UMKM kerap terkendala persyaratan SPT dan Laporan Keuangan untuk menayangkan produk pada katalog lokal.
- Terdapat 75 pemerintah daerah dengan total produk tayang 1.977 produk namun tidak melakukan satupun transaksi dalam e-katalog lokal.
- Pemerintah daerah tidak dapat mengadakan PDN karena produk tersebut sedang turun tayang untuk pengurusan perizinan



HASIL REVIU – ASPEK SUPPLY

Supply PDN tidak dapat memenuhi kebutuhan/permintaan terutama untuk produk berspesifikasi tinggi seperti alat kesehatan, peralatan komputer, dan peralatan elektronik



Outlook Capaian Pengawasan P3DN Daerah

1. Rendahnya realisasi PDN berbanding lurus dengan rendahnya tren penyerapan anggaran dan PBJ pada Tw I dan II. Upaya percepatan diperlukan untuk mendorong realisasi anggaran dan PBJ agar target PBJ PDN dapat tercapai.
2. Tim P3DN pada Pemda belum menjalankan fungsinya dengan baik, dan perlu dilakukan monitoring atas efektivitasnya.
3. Sebagian besar pemerintah daerah belum mendorong peningkatan jumlah produk tayang dalam katalog lokal, selain itu transaksi pemerintah daerah pada katalog lokal juga relatif rendah,.
4. Demand dan supply produk-produk tertentu dalam pasar pengadaan barang/jasa dalam negeri masih didominasi oleh produk impor.
5. Penerapan substitusi impor perlu didukung strategi pemberdayaan industri daerah dan intensifikasi keberpihakan terhadap produk lokal



REKOMENDASI AKSI AFIRMASI P3DN DAERAH

1. Kementerian Dalam Negeri agar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan PBJ secara keseluruhan.
2. Pemerintah daerah agar menyusun rencana aksi P3DN dan memonitor progressnya.
3. APIP agar melakukan pengawasan atas implementasi P3DN di antaranya efektivitas Tim P3DN dan validasi atas penginputan RUP seluruh OPD.
4. Pemerintah daerah agar memaksimalkan peran bimtek dan konsultasi LKPP untuk meningkatkan jumlah katalog lokal.
5. Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi, serta kementerian terkait lainnya agar mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor.



Burung pipit di atas lautan

Terbang mendekat indah takterkira

Ayo P3DN ditingkatkan

Sambut Kebumen International expo
dengan gembira

Terimakasih

